

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana konsep *namus*—kehormatan perempuan—diartikulasikan ulang dalam mobilisasi politik Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dengan fokus pada peran pejuang perempuan sejak 1990-an. Melalui pendekatan *Political Discourse Analysis* (PDA), penelitian ini berargumen bahwa PKK merekonstruksi *namus* yang semula bermakna kehormatan patriarkis menjadi simbol kolektif perlawanan dan kemuliaan dalam perjuangan kebebasan bangsa Kurdi. Reartikulasi *namus* ini berfungsi sebagai jembatan ideologis yang menghubungkan emansipasi perempuan dengan proyek pembebasan nasional Kurdi, sekaligus menautkan pengalaman penindasan perempuan dengan kondisi bangsa Kurdi yang tidak memiliki negara. Berakar pada pengalaman sebagai bangsa tanpa negara, gerakan etno-transnasional PKK mengubah batas teritorial dari garis pemisah menjadi ruang solidaritas dan identitas politik bersama. Keterlibatan perempuan menjadi elemen sentral, tidak hanya sebagai strategi politik untuk memperluas visibilitas gerakan, tetapi juga sebagai upaya menegosiasikan kembali norma gender tradisional, mentransformasi identitas PKK, dan mendefinisikan ulang subjek perempuan—dari objek kehormatan menjadi agen revolusioner dan kebebasan. Penelitian ini berkontribusi pada diskusi mengenai politik kekerasan dan perlawanan dalam perspektif gender dan gerakan sosial, khususnya dalam konteks perjuangan etno-transnasional yang menantang batas-batas negara-bangsa modern.

Kata kunci: *Namus*, Perempuan Kurdi, PKK, Mobilisasi Politik, Gender, Feminisme Post-strukturalis, Politik Perlawanan, Etno-transnasional

ABSTRACT

This study examines how the concept of *namus*— women’s honor —is rearticulated within the political mobilization of the Kurdistan Workers’ Party (PKK), focusing on the role of female fighters since the 1990s. Using a Political Discourse Analysis (PDA) approach, this research argues that the PKK reconstructs *namus*, originally understood as a form of patriarchal honor, into a collective symbol of resistance and dignity within the Kurdish liberation struggle. This rearticulation serves as an ideological bridge linking women’s emancipation to the Kurdish national liberation project, while connecting women’s experiences of oppression to the stateless condition of the Kurdish people. Rooted in the Kurdish experience as a nation without a state, the PKK’s ethno-transnational movement transforms territorial boundaries from lines of separation into spaces of solidarity and shared political identity. Women’s participation becomes central — not only as a political strategy to expand the movement’s visibility, but also as an effort to renegotiate traditional gender norms, transform the PKK’s identity, and redefine the female subject from an object of honor into an agent of revolution and freedom. This study contributes to broader discussions on the gendered politics of violence, resistance, and social movements within the context of ethno-transnational struggles that challenge the boundaries of the modern nation-state.

Keywords: *Namus*, Kurdish Women, PKK, Political Mobilization, Gender, Post-structural Feminism, Politics of Resistance, Ethno-Transnation